

Bab III

Teori Hubungan Internasional dan Sistem Modern

3.1. Sistem Ilmu Hubungan Internasional dalam Sistem Sosial

Teori hubungan internasional sebagai sebuah sistem sains dalam sistem sosial merupakan refleksi dari keadaan sistem sosial secara keseluruhan di era tertentu. Bagaimana hubungan internasional dikomunikasikan mencerminkan keadaan masyarakat yang dominan pada saat itu. Maka perdebatan idealis-realis bukanlah perdebatan mengenai metodologi dan empirisme, namun lebih merupakan hasil dari perubahan tempramen dan suasana masyarakat. Kebangkitan realisme tidak hanya didorong oleh 'kemenangan intelektual' atau kegagalan idealisme, melainkan lebih dari itu. Pemikiran mengenai *power politic* telah ada sebelum Perang Dunia II. Maka pecahnya Perang Dunia II lebih merupakan sebuah legitimasi untuk para pemikir realis dibandingkan sebuah anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh pemikiran sebelumnya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kemunculan transnasionalisme di awal 1970-an dan kemunculan neorealisme di awal 1980-an. Perbedaan karena tempramen ini tidak dapat lebih jelas dari perdebatan neoliberal/neorealis di akhir 1980-an, di mana perbedaan antara keduanya hanya pada perbedaan ekspektasi atas kemungkinan kerjasama, hanya antara optimisme/pesimisme. Cara berpikir kelompok idealis di periode antar Perang Dunia terus timbul dan menghilang begitu juga asumsi-asumsi yang mendasari realisme. Ferguson dan Mansbach bahkan mengikuti pola ini sejak zaman Yunani Kuno (Ferguson & Mansbach, 2002 hlm. 61-72).

Hal yang sama juga berlaku bagi proliferasi pendekatan reflektif/konstitutif dalam periode kontemporer terutama apa yang dikenal dengan paradigma konstruktivis. Penggambaran yang umum mengenai kemunculan konstruktivis adalah sebagai kompromi mengenai perdebatan positivis dan post positivis. Perdebatan keduanya mengenai epistemologi tidak memiliki akhir yang pada akhirnya muncul jalan tengah dalam bentuk konstruktivis dan ontologi barunya. Dalam pendekatan teori sistem proliferasi konstruktivis dalam berbagai jenis dan 'tingkatan reflektivitas'nya lebih merupakan refleksi dari transformasi masyarakat dunia dari sebuah masyarakat negara-negara ke masyarakat global. Bahkan beberapa

menggambarkan perubahan dari masyarakat modern ke masyarakat post-modern untuk menggambarkan suasana ini. Mengenai ini perlu dibahas lebih luas.

Pendekatan *post positivist* bermunculan di awal 1990-an untuk menyanggah dominasi kelompok rasionalis-positivis. Terinspirasi oleh pemikir-pemikir dalam filosofi, kelompok ini mencoba memperdebatkan subyektivitas dalam ilmu pengetahuan. Masalah mengenai dominasi salah satu bagian (baca: realis dan segala turunannya) dalam penggambaran keseluruhan (baca: hubungan internasional) berhasil dibongkar dan dipermasalahkan. Debat epistemologi, mengenai relativitas kebenaran dalam sains, maka ialah penemuan mengenai hubungan antara sistem sains sebagai bagian dari sistem sosial dengan semantik sistem sosial secara keseluruhan. Mereka menandai bagaimana interpretasi lain ditinggalkan (*Critical Theory*), menyarankan emansipasi untuk menghancurkan dominasi (*post-structuralist, neo-marxist*), sampai berada dalam posisi bahwa tidak ada interpretasi yang dapat menceritakan kisah sesungguhnya (*post-modern*). Singkatnya sistem sains, khususnya sistem ilmu hubungan internasional, sampai pada titik di mana mereka menyadari bagaimana sistem sosial terbentuk sesuai kerangka berpikir sistem sosial sebagai sistem yang swareferensial. Menyadari bahwa sistem sains merupakan salah satu bagian dari sistem sosial yang berusaha ia deskripsikan.

Namun yang seringkali terlupakan dalam tulisan-tulisan perspektif *post positivist* ialah relativitas yang mereka tunjukkan tidak hanya berlaku antar narasi-narasi di dalam teori hubungan internasional, relativitas juga terdapat antara narasi-narasi tersebut dengan metanarasi di atasnya (Albert, 2001). Contohnya seperti dalam munculnya konsep fundamentalis agama di saat sekarang ini. Fundamentalis atau bentuk radikalisme apapun hanya muncul jika semantik di atasnya berlawanan dengan pemaknaan yang dikandung oleh fundamentalisme tersebut. Kelompok kristen ortodoks bukan merupakan fundamentalis dalam masyarakat abad pertengahan di mana dominasi gereja katolik membentuk struktur masyarakat dunia ketika itu.

Menyerahkan pembentukan teori terhadap relativitas ilmu pengetahuan maka bukan jalan keluar yang terbaik. Walaupun usaha meraih apapun yang bebas nilai tidak akan pernah tercapai, khususnya di dalam sistem sains, pada saat tertentu

teori tertentu akan mengandung makna lebih dibandingkan teori lainnya. Para ilmuwan hubungan internasional bukanlah kumpulan orang-orang naif yang tinggal di menara gading, mereka tentunya orang-orang yang peka terhadap lingkungannya. Pemikir seperti Wilson, Carr, Morgenthau, Keohane, maupun Waltz bisa dominan di jamannya karena kemampuan mereka merefleksikan keadaan hubungan internasional di eranya masing-masing. Empirisme dapat dicapai, namun yang harus disadari – seperti yang telah dijelaskan melalui narasi evolusi teori hubungan internasional di atas – mereka harus peka terhadap perubahan. Keohane yang mungkin merupakan pemikir yang memiliki label yang paling beragam – neoliberal, institusionalis, transnasionalis, neorealis - mungkin merupakan contoh pemikir yang sangat terbuka pada perubahan. Karena walau bagaimanapun sistem sains berfungsi merefleksikan deskripsi masyarakat modern, ia harus dapat beradaptasi dengan perubahan di dalam masyarakat modern jika ingin tetap setia pada kode *true/false* dan terus bereproduksi.

Sistem sosial sebagai sebuah sistem yang terintegrasi secara global, terus mengalami perubahan. Periode pasca Perang Dunia II hingga awal 1990-an menandakan periode di mana subsistem politik dominan dibandingkan dengan subsistem lainnya di tingkatan global. Komunikasi politik hanyalah salah satu dari banyak komunikasi lain yang membentuk jejaring sistem sosial. Oleh karena itu Luhmann cenderung menolak pendekatan mengenai *political society* ataupun pendekatan marxis mengenai *economic society* (Arato, 1994). Keduanya hanya menandakan dominasi salah satu subsistem di dalam sistem sosial secara keseluruhan.

Karena itu apa yang melatarbelakangi dominasi realis dalam studi hubungan internasional adalah kenyataan bahwa komunikasi politiklah yang mendominasi hubungan di tingkat global pada periode sebelum berakhirnya perang dingin. Realis tidak seburuk yang dikritik oleh penolaknya dalam penggambarannya terhadap fenomena hubungan internasional. Realis bukanlah merupakan teori hubungan internasional di dalam sistem sosial dunia, namun merupakan teori mengenai bagaimana komunikasi politik sebagai sistem sosial mengamati dirinya sendiri dalam tingkat internasional. Menjelaskan bagaimana politik internasional bekerja sebagai sebuah subsistem politik dalam sistem sosial (Albert, 2004).

Wendt mengatakan bahwa neorealis adalah ilmu hubungan internasional perang dingin karena ia mendeskripsikan fenomena hubungan internasional pada saat itu, sekaligus membentuk fenomena hubungan internasional pada saat itu (Wendt, 1999).

Kondisi dunia kontemporer yang ter-fragmegrasi maka bukanlah bentuk masyarakat yang *post modern*. Dunia saat ini maka bukan merupakan dunia *post modern*, melainkan dunia di mana mekanisme pembentukan masyarakat modern telah disadari. Dalam cara pikir ini proliferasi konstruktivis dalam teori hubungan internasional merupakan perkembangan reproduksi sistem ilmu hubungan internasional untuk beradaptasi terhadap keadaan kontemporer (i.e. globalisasi). Bukan karena teori konstruktivis lebih baik dari teori-teori yang sebelumnya, atau sebagai sebuah jalan tengah dalam perdebatan antara positivis dan pos positivis. Sederhananya, dunia sekarang, dengan absennya ketegangan militer yang berskala besar dan kemajuan teknologi komunikasi, terlihat lebih transparan hingga menelanjangi bentuk hubungan sosial di dunia yang sebelumnya direduksi ke dalam pergaulan antar-negara.

3.2. Hubungan Internasional dan *World Society*

Ilmu hubungan internasional melandaskan penelitiannya mengenai *society* dari konsep mengenai sistem internasional. Dalam dunia kontemporer maka fokus penelitian hubungan internasional terarah pada dunia yang *post-westphalian*. Keadaan di mana batas antar negara tidak sepenting dulu akibat proliferasi aktor-aktor non-negara dalam interaksi di tingkat internasional seperti organisasi non-negara, jejaring kelompok advokasi transnasional, perusahaan transnasional, media baru, hingga gerakan protes dan solidaritas transnasional. Bentuk baru ini maka mempertanyakan sistem internasional dan mulai mengangkat ide tentang masyarakat dunia (*world society*).

Idenya ialah dengan tergerusnya peran negara oleh globalisasi konsep dunia sebagai kumpulan negara-negara tidak lagi relevan. Kini dunia terdiri dari kompleks aktor yang jauh lebih dari sekedar sebuah sistem internasional. Maka yang umum terjadi dalam studi globalisasi dalam hubungan internasional ialah dipertanyakannya konsep negara kedaulatan. Suatu yang alami terjadi karena

ketika dunia merupakan kompleks aktor transnasional maka dunia bukan lagi kompleks sistem internasional. Harus salah satu diantaranya, tidak dapat keduanya.

Salah satu pemikiran paling populer dalam masalah ini ialah pemikiran mengenai interdependensi. Rober Keohane dan Joseph Nye, dalam argumen mereka mengenai interdependensi kompleks, melihat realisme terlalu dibutakan oleh konsepsi yang salah mengenai sentralitas isu kekuatan militer dan negara-bangsa di dalam analisis hubungan internasional. Sebaliknya mereka menekankan kenyataan bahwa pada perkembangan di tahun 1970-an menunjukkan tidak ada laginya hierarki di antara isu-isu yang ada, yang berarti bahwa keamanan militer tidak lagi mendominasi agenda. Mereka menyoroti meningkatnya peran aktor-aktor transnasional dan isu-isu non-keamanan di periode tersebut. Oleh karena itu mereka mengkritik struktur anarki yang dikedepankan oleh realisme dan mengajukan struktur interdepenensi sebagai bentuk baru dalam hubungan internasional.

Interdependensi kompleks menggarisbawahi kemungkinan bekerja sama dalam kondisi anarki melalui peranan institusi dan informasi. Di dalam dunia yang secara ekonomi telah berkembang, akan menciptakan peningkatan kesalingketergantungan yang lalu menumbuhkembangkan kerjasama. Kerjasama yang tentunya tidak tercipta melalui keuntungan bersama semata, namun merupakan hasil dari hubungan terus menerus yang secara gradual meningkatkan kesalingpahaman. Di sini Keohane dan Nye mengemukakan dua dimensi dalam interdependensi yaitu kesensitifan (respons aktor terhadap sebuah peristiwa) dan kerentanan (kemampuan aktor untuk mengisolasi diri dari pengaruh sebuah peristiwa). (Keohane & Nye, 1999)

Keohane dan Nye membantuk mendorong hubungan internasional ke dalam apa yang sekarang disebut sebagai ekonomi politik. Konsep mereka mengenai interdependensi kompleks memiliki peranan yang besar dalam teorisasi hubungan internasional. Namun permasalahan dari pemikiran mereka ialah, kegagalan mereka dalam menyarikan, apalagi meredefinisi, konsepsi realis mengenai *state*. Bagi mereka *state* tetap merupakan *nation-state* yang berdasarkan teritorial, karena itu bagi mereka interdependensi dalam level politik hanya ada melalui

organisasi internasional dan berbagai *regime* yang spesifik terhadap isu tertentu. Maka di dalam pemikiran hubungan internasional ataupun ekonomi politik internasional, interdependensi secara umum digambarkan dalam konsepsi yang sangat terbatas. *State* tergambarkan sebagai sebuah entitas nasional, dimana hubungan saling ketergantungan ada pada kesamaan adaptasi terhadap pasar dunia dan berbagai *regime* lain-nya. (Shaw, 2000)

Dalam memandang globalisasi maka perkembangan dari teori interdependensi akan menggambarkan globalisasi sebagai sesuatu yang berada di luar negara. Perubahan struktural akibat perkembangan teknologi yang memperumit kebijakan internasional negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Ini lahir melalui penggambaran interdependensi sebagai sebuah luapan dari tujuan di tingkat domestik, yang harus dicapai dengan melalui hambatan yang berada di luar sana (Clark, 1999). Pemikiran mengenai interdependensi tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan konsep anarki, di mana keadaan tersebut tidak bersifat prediktif. Anarki maupun interdependensi dapat menciptakan konflik ataupun kerjasama, tidak memiliki teorisasi yang kuat.

Bahkan jika alur pemikiran Keohane dan Nye diikuti, dan disetujui bahwa dalam jangka panjang interdependensi akan mengakibatkan perubahan sikap negara. Perubahan yang digambarkan hanya berada dalam perubahan perilaku. Kepentingan nasional dan tujuannya masih sama, namun negara harus melewati 'jalan memutar' untuk mencapai tujuan tersebut karena adanya interdependensi. Kenyataannya proses globalisasi mengubah lebih dari itu. Globalisasi menunjukkan kondisi yang lebih radikal, di mana terjadi transformasi bentuk *state*, perubahan tujuan nasional, bahkan model internal pemerintahan maupun perekonomian domestik. Atas dasar itu globalisasi juga membentuk bagaimana *state* terbentuk, sebagaimana globalisasi merupakan bentuk *state*.

Karena itu interdependensi harus dibedakan dari globalisasi. Konsep interdependensi kompleks tidak dapat menggambarkan perubahan yang disebut di atas melainkan hanya menyebutkan bahwa peningkatan interdependensi berarti peningkatan hambatan bagi suatu tindakan. Sebaliknya globalisasi merupakan suatu Konsep interdependensi kompleks tidak dapat menggambarkan perubahan yang disebut di atas melainkan hanya menyebutkan bahwa peningkatan

interdependensi berarti peningkatan hambatan bagi suatu tindakan. Sebaliknya globalisasi merupakan suatu yang *endogeneous*, membentuk ulang negara dalam proses pembentukannya.

Akibatnya kecenderungan penggunaan konsep interdependensi kompleks dalam fenomena globalisasi menyebabkan kecenderungan melihat globalisasi sebagai suatu hal yang berlawanan dengan kekuatan-kekuatan transnasional. Penurunan peran negara, hingga hilangnya kedaulatan, menjadi pokok pemikiran yang mendominasi penggambaran proses globalisasi.

Ini terjadi karena konsep mengenai *society* yang digunakan dalam hubungan internasional merupakan konsep yang berasal dari pandangan klasik sosiologi. Pandangan yang melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan yang terintegrasi oleh norma bersama atau melalui sebuah identitas kolektif. Mereka mengajukan perasaan komunitas yang akan mempertahankan bentuk masyarakat ini terhadap kecenderungan disintegratif akibat proses modernisasi, individualisasi, dan rasionalisasi. Bentuk perasaan komunitas ini beragam, dapat berbentuk identitas etnik, norma bersama, nasionalitas, hingga sebuah konstitusi legal. Namun seluruh teori ini memiliki kelemahan ketika diterapkan dalam pembangunan konsep *world society*. Mereka secara sistematis mengeluarkan fakta-fakta sosial yang tidak sesuai dengan kerangka integratifnya dari luar *society*, seperti misalnya, pemikiran Buzan mengenai mengenai *international society* sebagai *society of states* (Buzan, 2004). Ketika ada sebuah negara melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan dan norma bersama ia merelegasi bentuk *international society* ke *international system*. Ini serupa dalam pola eksklusi kriminal dari masyarakat. Bagaimana kriminal dikatakan harus dikeluarkan dari masyarakat atau diintegrasikan ke dalam masyarakat.

Dalam keadaan kontemporer yang sangat kompleks bentuk masyarakat dunia yang berdasarkan integrasi atas identitas dan norma kolektif tentunya akan sulit. Dalam penggambaran bentuk baru 'hubungan internasional kontemporer' yang memasukan entitas selain *state* dan transnasional, semantik *nation state* tidak dapat dikorbankan. Bentuk sistem politik di tingkatan internasional yang terdiri dari kumpulan negara-negara berlandaskan wilayah adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat internasional yang terdiri dari entitas selain negara harus

mengorbankan integrasi lingkungan global yang menjadi pengikat kata hubungan internasional. Hierarki yang dibentuk melalui internasional/domestik, anarki/order, dan lain sebagainya yang sekian lama telah berfungsi sebagai dasar teorisasi Hubungan Internasional seakan-akan kehilangan fungsinya. Jika ada suatu hal yang dikatakan sebagai *world society* di luar sana, maka ide mengenai masyarakat nasional yang tertutup, atau kompleks masyarakat *nation-state*, yang mendasari keberadaan hubungan internasional menjadi problematis. Dan dapat diperdebatkan bahwa penggunaan konsep *society* secara berganda di dalam teori hubungan internasional mengenai *international* atau *world society* bereaksi dalam kebutuhan untuk mempertahankan identitas disiplin, dengan menghindari pertanyaan mengenai konsep mana, atau teori masyarakat mana, yang pantas untuk mempelajari *world society*.

Dalam hubungan ini kebanyakan usaha untuk menggunakan konsep *society* dalam hubungannya dengan sistem global kontemporer yang terpecah-pecah dan kompleks kerap menemui masalah. *World society* tidak dapat digambarkan sebagai suatu hal yang berada di samping *national societies*, dengan komitmen bersama dengan masalah-masalah global, dirivalkan dengan masalah-masalah di dalam negara. Sebuah *international society* dari negara-negara tidak dapat terpisah dari *national societies*, namun merepresentasikan perubahan bentuk di dalamnya termasuk gambaran yang mengikuti perubahan dalam bentuk *national society*. Ini yang menjadi masalah bagi keempat usaha dalam memecahkan problematika *great divide* dihadapan globalisasi yang dirangkum oleh Ian Clark (Clark, 1999), dan dijelaskan di bagian pendahuluan tulisan ini. Pendekatan pengambilan keputusan Keohane dan Milner masih menempatkan *state* sebagai satu-satunya corong hubungan di tingkat internasional, mengekskusi hubungan transnasional. Pendekatan strukturalis mengeliminasi kenyataan bahwa secara faktual ada negara bangsa di dalam lingkungan internasional. *English school* dan konstruktivis lebih dekat lagi pada argumen ketergantungan pada penjelasan *society* yang direkatkan oleh suatu *shared identity*. Keduanya bergantung pada ide bahwa ada kekuatan abstrak yang mengatur hubungan antar negara dan terus menerus mengubah negara-negara tersebut. Dengan sendirinya melakukan eksklusi secara naif pada bentuk-bentuk ide lainnya di luar yang mereka

kemukakan.

Masyarakat internasional yang terdiri dari entitas selain negara harus mengorbankan integrasi lingkungan global yang menjadi pengikat kata hubungan internasional. Hierarki yang dibentuk melalui internasional/domestik, anarki/order, dan lain sebagainya yang sekian lama telah berfungsi sebagai dasar teorisasi Hubungan Internasional seakan-akan kehilangan fungsinya. Jika ada suatu hal yang dikatakan sebagai *world society* di luar sana, maka ide mengenai masyarakat nasional yang tertutup, atau kompleks masyarakat *nation-state*, yang mendasari keberadaan hubungan internasional menjadi problematis. Dan dapat diperdebatkan bahwa penggunaan konsep *society* secara berganda di dalam teori hubungan internasional mengenai *international* atau *world society* bereaksi dalam kebutuhan untuk mempertahankan identitas disiplin, dengan menghindari pertanyaan mengenai konsep mana, atau teori masyarakat mana, yang pantas untuk mempelajari *world society*.

Maka ide mengenai masyarakat dunia harus melangkah dari perdebatan mengenai seberapa jauh proses globalisasi terjadi, masih penting tidaknya bentuk negara kedaulatan, atau seberapa besar peran aktor selain pemerintah dalam pengambilan keputusan. Karena pada kenyataannya negara ada, dan aktor selain negara ada. Penggambaran mengenai masyarakat dunia tidak dapat mengeksklusi satu pihak pun. Apa yang hilang, dengan kata lain, ialah konseptualisasi *world society* yang melihat sistem global sebagai sebuah keseluruhan tanpa menurunkan derajat proses-proses yang tidak integratif ke luar *society*, namun memasukannya sebagai bagian dari fenomena yang harus diperhatikan dalam *theory of society*. Dengan ini pembangunan teori tidak lagi harus mengkonflikkan antara *national society* dengan *world society*. Karena *national society* merupakan bagian dari *world society* (Albert, 2004).

Dalam kerangka ini melibatkan MST dalam penelitian mengenai hubungan internasional dapat berguna. MST menggambarkan *world society* sebagai satu-satunya *society* yang ada, dan merupakan sistem sosial dalam taraf tertinggi yang mungkin ada. Inti dari MST ialah meninggalkan paradigma penggambaran sistem sebagai hubungan bagian/keseluruhan kepada hubungan antara sistem dengan lingkungannya. Melalui ini formasi semantik sosial dunia (masyarakat dunia),

yang menjadi kajian (atau lebih tepatnya didorong untuk menjadi kajian) ilmu Hubungan Internasional dilepaskan dari jebakan permasalahan dualisme antara *world society* dan *international system*. Fenomena hubungan internasional maka tidak dapat dipandang sebagai suatu yang berbeda dari *world society*, namun dapat digambarkan sebagai bagian dari *world society* tersebut.

3.3. Kesimpulan

Teori Sistem Modern dapat memenuhi tiga kriteria yang diberikan Clark mengenai teori yang dapat menjelaskan globalisasi. Pertama dengan menggambarkan masyarakat dunia sebagai suatu kompleks jejaring komunikasi-komunikasi simbolik yang berdasarkan fungsi, Teori Sistem Modern tidak terjebak terhadap dikotomi antara sistem internasional dengan dunia global yang transnasional. *State* digambarkan sebagai sebuah bentuk penutupan operasi komunikasi politik ke dalam referensi eksternal terhadap batas teritorial hingga dapat dicapai keputusan yang mengikat secara kolektif. Artinya, *state* bukan lagi batasan teritorial, melainkan sebuah formasi sosial yang terbentuk melalui penggunaan *power* di dalam sistem politik sebagai sebuah sistem sosial. Sebagai hanya salah satu bentuk dari sistem-sistem fungsi lain-nya di dalam masyarakat dunia, bentuk *state* maka dapat hadir bersama (*co-exist*) dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya di dalam dunia sosial, seperti penggunaan kebenaran dalam sains, uang dalam ekonomi, ataupun keindahan dalam seni, yang komunikasinya tidak dibatasi oleh batas nasional. Harus ditekankan bahwa tidak dibatasi dalam hal ini berarti penggunaan medium-medium simbolik tersebut tidak bergantung pada batas teritorial, karena batas teritorial merupakan spesifik bentuk komunikasi politik. Mata uang karena itu merupakan bentuk komunikasi politik, yang tetap saja tidak dapat menghalangi komunikasi ekonomi berbentuk pembayaran hanya di dalam negara saja.

Ini kemudian berkaitan dengan kriteria kedua yang diajukan oleh Clark mengenai perhatian terhadap kapitalisme. Sebagaimana *state* merupakan bentukan komunikasi politik sebagai sistem sosial, kapitalisme juga merupakan bagian dari sistem ekonomi. Bagi Teori Sistem Modern masyarakat modern membentuk melalui diferensiasi internalnya yang berdasarkan fungsi-fungsi spesifik dan

swarefleksif. Artinya teori ini menolak penggambaran masyarakat sebagai sebuah komunitas politik ataupun komunitas ekonomi. Karena itu kapitalisme, sebagai sebuah sistem ekonomi memiliki tingkatan yang sama dengan bentuk *state* sebagai sistem politik di dalam sebuah masyarakat dunia. Posisi mereka hanya sebagai hasil dari diferensiasi internal berdasarkan fungsi. Namun pada saat tertentu salah satu bentuk dari sistem sosial memiliki keutamaan dibanding dengan sistem lainnya. Atas dasar itu pemahaman Marxis mengenai masyarakat ekonomi merupakan refleksi dari dominasi ekonomi terhadap sistem-sistem lainnya di masyarakat, begitu juga masyarakat politik merupakan keadaan di mana sistem politik lebih diutamakan dari sistem lainnya. Tapi tetap saja posisi semua sistem setara, dan memiliki peran dalam pembentukan keseluruhan sistem sosial.

Terakhir berkaitan dengan bagaimana perubahan-perubahan politik terjadi. Di sini Teori Sistem Modern menggantikan konsepsi agen-struktur yang dikemukakan oleh konstruktivis sebagai bentuk dari hubungan antara *state* (agen) dengan sistem internasional (struktur) dengan diferensiasi medium/form. Artinya, perilaku *state* yang merupakan refleksi dari identitas-nya merupakan sebuah formasi sosial yang membentuk melalui operasi berulang penggunaan medium *power*. Maka perubahan politik, bahkan transformasi identitas *state* merupakan suatu yang *contingent* terhadap bagaimana *power* di dalam model internalnya beroperasi.

Perubahan penggunaan medium *power* ini berarti perubahan di tingkat domestik ataupun internasional. Model internal penggunaan *power* (yang berarti juga apa yang dapat memberikan *power*) beradaptasi terus menerus dengan berbagai perubahan di dalam sistem fungsi lain selain fungsi politik. Adaptasi ini swarefleksif, bergantung pada bentuk komunikasi politik spesifik di dalam *state* tersebut. Maka embargo ekonomi, misalnya, tidak akan memberikan makna yang sama terhadap pembentukan *power* di dalam Iran dan Korea Utara.